

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku :

- Harahap, Zairin. 2002 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Cetakan III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H.R, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Ibrahim, Jhony, 2008 *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I dan Buku II. Cetakan IV. Jakarta : Pustaka sinar Harapan
- Kartika, Titiek. 2016. “*Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015*” Pustaka Obor, Jakarta.
- Marbun, S.F., *Dimensi dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta. 2012
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predia Media Group
- Titik triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Kencana
- Tjakranegara R., Soegijatmo. 2000 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika
- Tjandra R riawan. 2002 *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Edisi Pertama Cetakan I. Revisi II. Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Wiyono, R, 2009 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Perundang Undangan :**

Undang Undang nomer 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986  
NOMOR 77)

Undang Undang Nomer 9 tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang  
nomer 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara  
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR  
35)

Undang Undang Nomer 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang  
dasar nomer 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.(LEMBARAN  
NEGARA REPUBLIM INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 160)

Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan  
peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang  
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang  
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR  
245)

Undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas  
undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah  
pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,  
bupati, dan walikota menjadi undang-undang (LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 57)

Peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 11 tahun  
2014 tentang pengawasan pemilihan umum.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun  
2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan  
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau  
walikota dan wakil walikota.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus  
Sengketa Pilkada

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis  
sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah (Pilkada)

Internet :

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/tun>

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

<http://kpu-lomboktengahkab.go.id/>